

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN GARUT

Erna Rustiana<sup>1</sup>, Ujang Wahid Muhammad Abdillah<sup>2</sup> dan Hedi Cupiadi<sup>3</sup>

### Abstrak

Pemerintah Kabupaten Garut mencanangkan program prioritas pembangunan 10 destinasi wisata agar lebih nyaman dan aman berdasarkan hasil penilaian tingkat kunjungan dan potensi wisatanya yang bagus sehingga banyak pengunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut yang ditinjau dengan pendekatan kriteria yang dikembangkan oleh Yoeti, yaitu *attraction* (atraksi), *accessibility* (aksesibilitas), dan *amenities* (fasilitas). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah masalah. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain aksesibilitas masih kurang mendukung seperti jalan menuju lokasi wisata relatif kecil, sarana dan prasarana pada obyek wisata belum dikelola dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang budaya sadar wisata dan manfaat dari pariwisata.

**Kata kunci:** Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pariwisata

### Abstract

*The Government of Garut Regency launched the priority of the development program of 10 tourist destinations to be more comfortable and secure based on the visits rate assessment results and a good tourism potential so that many visitors. The purpose of this research was to determine the implementation of tourism development policies in Garut Regency which were reviewed with the criteria approach developed by Yoeti, namely attraction, accessibility, and amenities. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach to describe the implementation of tourism development policies in the Garut Regency. The sampling technique uses purposive sampling, while the collecting data technique uses interviews with informants, documentation, and*

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Garut ([erna.rustiana@fisip.uniga.ac.id](mailto:erna.rustiana@fisip.uniga.ac.id))

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Garut

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi – Universitas Garut ([hedi.cupiadi@uniga.ac.id](mailto:hedi.cupiadi@uniga.ac.id))

*observation. The results show the implementation of tourism development policies in Garut Regency has been going well even though there are still a number of problems. Some of the problems identified include accessibility that is still not very supportive such as the road to the location of tourism is relatively small, facilities and infrastructure in tourism objects have not been managed properly due to budget constraints, as well as the low awareness of the public about the culture of tourism awareness and the tourism benefits.*

**Keywords:** *Policy, Policy Implementation, Tourism.*

## PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan Indonesia dan berdasarkan Propenas Bidang Pariwisata, diperlukan suatu strategi melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Kebijakan ini ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain; menjadikan pariwisata sebagai hasil devisa utama melalui sektor pariwisata, menjadikan pariwisata nusantara sebagai pendorong pembangunan, meningkatkan ketangguhan pariwisata nasional, peningkatan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, peningkatan kemitraan masyarakat, swasta, dan media massa, serta peningkatan kerjasama lintas sektoral.

Sejalan dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, pembangunan kepariwisataan tingkat kabupaten/kota diatur dalam Peraturan daerah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Barat. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan, dan keamanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, bahwa visi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten adalah terwujudnya Daerah Kabupaten sebagai destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat berbasis alam didukung budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, menuju masyarakat taqwa, maju, dan sejahtera.

Pada dasarnya pariwisata sangat mengandalkan adanya keunikan, kekhasan, kelokalan dan keaslian alam serta budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Melihat pada pengertian dalam Perda Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sementara itu, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berkaitan dengan daerah wisata, banyaknya kunjungan dari luar kota ke Kabupaten Garut menjadi faktor yang penting untuk dicermati. Dengan adanya berbagai objek wisata tersebut diatas, pemerintah daerah Kabupaten Garut perlu mempersiapkan diri sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing, salah satunya dengan menciptakan produk wisata handal, sehingga mampu berperan sebagai penyumbang devisa bagi pariwisata nasional, sekaligus memacu usaha pariwisata daerah menjadi unsur penting dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, sebagai kota tujuan wisata, Kabupaten Garut harus mampu memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Pusat-pusat penjualan cendera mata diperlukan agar memudahkan wisatawan mendapatkan cendera mata yang mereka inginkan. Begitu juga pusat-pusat kuliner. Fasilitas itu tidak perlu mewah tetapi harus tertata rapi dan bersih, agar menarik wisatawan untuk berkunjung. Dengan potensi yang ada di Kabupaten Garut, sudah tepat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Garut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata dan perdagangan, selain pertanian, perkebunan dan peternakan, serta industri kecil yang ada. Sektor-sektor tersebut akan saling mendukung satu sama lain dan membuka kesempatan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan perdagangan di Kabupaten Garut perlu dilakukan komparasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Adapun lembaga yang berperan langsung adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.

Selain kebijakan, beberapa faktor penentu yang lain adalah tersedianya sarana pendukung yang mampu memberikan kontribusi kepada perkembangan objek wisata di Kabupaten Garut. Beberapa sarana yang harus tersedia adalah akomodasi dan transportasi, serta pendukung lain yang terkait dengan objek wisata atau tempat perdagangan seperti terminal, sarana parkir, tempat berteduh, tempat bermain, pusat souvenir dan toilet umum. Hal tersebut tentunya harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur objek wisata dan lokasi perdagangan yang ada sehingga saling melengkapi.

Kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan perdagangan Kabupaten Garut tentunya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut agar mampu memanfaatkan faktor-faktor yang ada dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya inilah maka diperlukan program-program atau kebijakan pemerintah daerah yang memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Diharapkan

masyarakat dapat mengelola semua potensi yang ada secara maksimal. Faktor internal mempunyai peranan yang sangat dominan sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat. Masyarakat diminta secara tidak langsung memiliki kesadaran akan potensi yang bisa dimanfaatkan sehingga akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Upaya peningkatan potensi wisata telah dilakukan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan memberikan kemudahan perizinan. Hal ini lebih membuka kesempatan kepada investor untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor pariwisata yang potensial di Kabupaten Garut. Kemudahan perizinan ini pula telah memberikan dampak positif kepada perkembangan perdagangan di Kabupaten Garut dikarenakan adanya hubungan antara penambahan lokasi pariwisata dan kesempatan membuka usaha di tempat yang sedang dikembangkan tersebut. Pihak swasta yang selama ini mengupayakan pengembangan yang ada meliputi pembangunan infrastruktur, sarana akomodasi maupun promosi skala besar. Selain itu, pengelolaan yang hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak swasta menjadikan pemasukan bagi Pendapatan asli Daerah (PAD) sesuai dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut tidak terlalu besar karena hanya mengandalkan pajak saja. Harapan masyarakat antara lain untuk meningkatkan PAD dan APBD Kabupaten Garut maka perlu dinaikkan pajak pendapatan terhadap aset pariwisata dan perdagangan daerah.

Beberapa penelitian sejenis antara lain oleh Kristiana dan Nathalia (2019) dengan kesimpulan hasil penelitiannya bahwa terdapat 16 pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Biak Numfo dan sebagian besar dari mereka menjabat sebagai subjek, pemegang nama yang memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Biak Num untuk Kabupaten, yaitu (1) pemahaman tentang destinasi pariwisata; (2) koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata; (3) sinergitas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor; dan (4) bantuan berkelanjutan<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Kristiana dan Nathalia. (2019). Peran Pelaku Kepentingan Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Pariwisata Pesona*. Vol. 04. No. 1. Juni. 60-66.

Penelitian lain oleh Irawan (2015) yang menyimpulkan bahwa model ideal kebijakan pariwisata yang akan diterapkan adalah pariwisata berbasis masyarakat. Beberapa kendala yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya sinergi (komunikasi) antara pemangku kepentingan, kurangnya kompetensi kebijakan pelaksana, dan kurang partisipasi masyarakat. Sementara di sisi lain, komitmen tinggi dari para pemimpin politik lokal dan dukungan yang baik fasilitas sumber daya menjadi faktor pendukung kebijakan<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian Indraningsih (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan namun terdapat kendala yang meliputi kurangnya komunikasi di antara pemangku kepentingan, kompetensi pelaksana kebijakan masih rendah, partisipasi masyarakat masih kurang,<sup>6</sup>

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti lakukan yaitu lokus penelitian pada tataran Pemerintah Daerah Kabupaten dan kajian analisisnya berdasarkan dimensi teori implementasi kebijakan Edward III dengan dimensi koordinasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Sedangkan peneliti mengkaji melalui evaluasi implementasi kebijakan dengan pendekatan teori Yoeti (2008) berdasarkan 3A yaitu *Attraction*, *Accessibility*, dan *Amenities* untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan<sup>7</sup>.

Kondisi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut belum sesuai harapan, hal ini masih terlihat dari beberapa permasalahan antara lain:

- a. *Attraction* (atraksi alam, seni budaya, adat istiadat) yang dikelola belum profesional sehingga terkesan seadanya,
- b. *Accessibility* (aksesibilitas) berupa jalan menuju lokasi/obyek wisata masih sempit sehingga sering menimbulkan kemacetan,
- c. *Amenities* (fasilitas) berupa sarana dan prasarana pada obyek wisata belum dikelola dengan baik sehingga kondisi penampilannya menjadi tidak menarik,

---

<sup>5</sup> Irawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jejaring Administrasi Publik*. Th./ VII. No. 2. Juli-Desember. 757-770.

<sup>6</sup> Indraningsih, G.A.K.A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA*. Vol. 1. No. 1. Juni. 31-40.

<sup>7</sup> Yoeti, Oka. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradaya Paramita: Jakarta. p. 165.

- d. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Garut.
- e. Budaya sadar wisata masih sangat rendah dikarenakan masyarakat belum sadar akan manfaat dari pariwisata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) bagaimana implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut?; dan (2) bagaimana hasil implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Garut?.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut, dan (2) untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut berdasarkan kriteria *attraction*, *accessibility*, dan *amenities*.

### **Tinjauan Teoritis**

Kerangka teori yang menjadi pijakan dalam penelitian ini terdiri dari sisi keilmuan administrasi publik tentang kebijakan publik yaitu teori implementasi kebijakan dan keilmuan kepariwisataan yang menjadi topik penelitian.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik hadir dan berperan sentral dalam kehidupan masyarakat dan di sekitar kita. Wahab (2012) yang mengutip Ghani dan Lockhart (2008) menyatakan bahwa “Kebijakan publik (*public policy*) dirangkai dalam dua kata, yaitu “kebijakan” dan “publik”<sup>8</sup>. Menurut Islamy (2009), terdapat sejumlah elemen dalam kebijakan publik, yaitu: (1) bentuk awal dari kebijakan publik adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus dilaksanakan dalam bentuk nyata, (3) kebijakan publik selalu dilandasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan (4) objek kebijakan publik ditujukan bagi kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Dengan demikian, kebijakan publik selalu merepresentasikan tindakan pemerintah secara nyata dengan maksud untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik mestilah berkaitan dengan persoalan bersama (*collective*

---

<sup>8</sup> Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi Aksara: Jakarta. p. 5.

<sup>9</sup> Islamy, M. I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta. p. 20.

*problem*) yang karena alasan politis, teknis, administratif, dan finansial membutuhkan intervensi pemerintah dan tidak bias diselesaikan secara individual. Dalam konteks inilah, pariwisata termasuk “problem publik” yang membuat negara harus hadir untuk mengaturnya.

Untuk bisa memahami kebijakan publik, diperlukan analisis, termasuk untuk mengetahui implementasinya. Dunn (2003) menyatakan, analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual dan praksis untuk menilai secara kritis dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam kebijakan<sup>10</sup>. Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan diharapkan bias menghasilkan informasi dan argumen untuk menjawab tiga pertanyaan berikut: (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai<sup>11</sup>.

Secara umum, terdapat tiga lingkup dalam studi atau analisis kebijakan, yaitu perumusan/formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Nugroho (2011) menambahkan dengan revisi kebijakan yang berarti reformulasi jika memang kebijakan itu pada implementasinya menimbulkan banyak hal baru (baik itu ide baru maupun hambatan) yang setelah dievaluasi dinyatakan perlu disikapi dengan perumusan kebijakan baru demi pencapaian tujuan.<sup>12</sup>

Dalam sejarah perkembangan kajian kebijakan publik, sejumlah pakar melakukan kategorisasi tipe kebijakan. Menurut Anderson (dalam Suharno, 2010), terdapat empat kategori kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan substantif dan prosedural; kebijakan distributif, pengaturan, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang kolektif dan barang privat. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang berkaitan dengan apa yang direncanakan atau telah dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan kategori ini mengalokasikan secara langsung keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut untuk masyarakat. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. p. 1

<sup>11</sup> Ibid. p. 97

<sup>12</sup> Nugroho, R. (2011). Kebijakan Publik. PT. Gramedia: Jakarta. p. 158

kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan yang dimaksud bisa dijalankan secara operasional, termasuk siapa yang diberi kewenangan untuk mengimplementasikannya<sup>13</sup>.

Mengacu pada kategorisasi versi Anderson tersebut, kebijakan pengembangan pariwisata bias dimasukkan ke dalam sejumlah irisan kategori, yaitu kebijakan substantif dan prosedural, kebijakan distributif, dan kebijakan yang berkaitan dengan *public goods*. Sebagai kebijakan substantif dan prosedural, kebijakan pengembangan pariwisata dalam konteks penelitian ini adalah prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus telah dimulai tahapan-tahapan implementasinya.

Sebagai kebijakan distributif, kebijakan pengembangan pariwisata telah mengalokasikan pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar destinasi dan wisatawan, seperti penyediaan infrastruktur, penguatan kelompok sadar wisata (darwis), dan bagi hasil pengelolaan wisata. Tentu saja dalam penyediaan infrastruktur tersebut menggunakan dana publik.

Adapun sebagai kebijakan yang berkaitan dengan *public goods*, kebijakan pengembangan pariwisata telah mengalokasikan *public goods* yang berhubungan dengan pariwisata untuk kepentingan semua kelompok sasaran. Misalnya pelayanan perizinan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Tachjan (dalam Iskandar, 2017) menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro<sup>14</sup>.

Lebih lanjut, Tachjan (dalam Iskandar, 2017) menjelaskan tentang unsur-unsur dari pelaksanaan kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu; 1) unsur

---

<sup>13</sup> Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press: Yogyakarta. p. 24-25

<sup>14</sup> Iskandar, J. (2017). Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Cetakan Keempat. Puspaga: Bandung. hal. 25.

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

pelaksana, 2) adanya program yang dilaksanakan, dan 3) target grup atau kelompok sasaran<sup>15</sup>. Menurut Dimock & Dimock (dalam Iskandar, 2017), unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan sebagai berikut: “Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”<sup>16</sup>.

Pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan Ripley dan Franklin (dalam Iskandar, 2017) yaitu unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam pelaksanaan kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan<sup>17</sup>.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Terry (dalam Iskandar, 2017) bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget<sup>18</sup>.

Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan unruk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya (Kusumanegara, 2010)<sup>19</sup>. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 26.

<sup>16</sup> Ibid. hal. 28.

<sup>17</sup> Ibid. hal. 27.

<sup>18</sup> Ibid. hal. 31.

<sup>19</sup> Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media: Yogyakarta. hal. 108.

teknik bekerja bersarna-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program<sup>20</sup>.

Iskandar (2017) menyimpulkan definisi kebijakan sebagai serangkaian rencana aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor, langkah demi langkah sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya<sup>21</sup>.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut, bisa ditarik benang merah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. tersebut adalah (Sugandi, 2011)<sup>22</sup>:

1. Isi atau *content* kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi *coment* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya, baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementor dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementatory*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah

---

<sup>20</sup> Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Center for Academic Publishing Services. Yogyakarta. hal. 147.

<sup>21</sup> Iskandar, J. (2017). Kapita Selekt Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Cetakan Keempat. Puspaga: Bandung.. hal. 180

<sup>22</sup> Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta. hal. 90-91

masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

### **Pariwisata**

Menurut Krapt dan Hunziker (dalam Yoeti, 2008), pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan dalam sebuah perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. ‖Orang asing‗ dalam hal ini bukan hanya orang dari luar negeri, tapi juga orang dari luar daerah yang menjadi destinasi wisata<sup>23</sup>.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan ‖wisata‗ adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka ‖waktu sementara‗.

Dalam ‖waktu sementara‗ menjadi titik tekan untuk menggambarkan ada intensitas waktu tertentu bagi wisatawan, sehingga orang yang pindah untuk menetap di daerah lain tentu bukan masuk dalam definisi wisatawan. Adapun lingkup kegiatan pariwisata dinyatakan sebagai ‖berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah‗.

Industri pariwisata mem-punyai sejumlah karakteristik unggul antara lain sebagai berikut; (1) sektor pariwisata mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu mendorong pertumbuhan berbagai sector usaha mikro, (2) sektor kepariwisataan menyerap banyak sumberdaya setempat, dan (3) industri pariwisata tidak mengenal *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan terbukti tidak terpengaruh dengan krisis (Sunaryo, 2013)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Yoeti, Oka. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradaya Paramita: Jakarta. hal. 112

<sup>24</sup> Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta. hal. 35

### *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Menurut pendapat Yoeti (2008), daya tarik atau atraksi wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti: atraksi alam (landscape, pemandangan laut, pantai, iklim dan fitur geografis lain dari tujuan), daya tarik budaya (sejarah dan cerita rakyat, agama, seni dan acara khusus, festival), atraksi sosial (cara hidup, populasi penduduk, bahasa, peluang untuk pertemuan sosial), dan daya tarik bangunan (bangunan, arsitektur bersejarah dan modern, monumen, taman, kebun, marina)<sup>25</sup>.

Pengertian daya tarik wisata menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I, pasal 5, juga mengemukakan pengertian dari daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata” adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sementara dalam Bab I, pasal 10, disebutkan kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kemudian Yoeti (2008) berpendapat bahwa berhasilnya suatu tempat wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*)<sup>26</sup>.

Pertama, atraksi: elemen-elemen didalam suatu atraksi wisata yang secara luas menentukan pilihan konsumen dan mempengaruhi motivasi calon-calon pembeli diantaranya: atraksi wisata alam (meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya), atraksi wisata buatan/binaan manusia (meliputi bangunan dan infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monument, trotoar jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, tempat keurbakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema), atraksi wisata budaya, (meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), agama dan seni, teater musik, tari dan

---

<sup>25</sup> Yoeti, Oka. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradaya Paramita: Jakarta. hal. 5

<sup>26</sup> Ibid. hal. 71

pertunjukkan lain, museum dan beberapa dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi even khusus, festival, dan karnaval), atraksi wisata sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial.

Kedua, amenitas/fasilitas: terdapat unsur-unsur didalam suatu atraksi atau berkenaan dengan suatu atraksi yang memungkinkan pengunjung untuk menginap dan dengan kata lain untuk menikmati dan berpartisipasi didalam suatu atraksi wisata. Hal tersebut meliputi: akomodasi (hotel, desa wisata, apartment, villa, caravan, hostel, guest house), restoran, transportasi (taksi, bus, penyewaan sepeda dan alat ski diatraksi yang bersalju), aktivitas (sekolah ski, sekolah berlayar dan klub golf), fasilitas-fasilitas lain (pusat-pusat bahasa dan kursus keterampilan), retail outlet (toko, agen perjalanan, souvenir, produsen camping), pelayanan-pelayanan lain (salon kecantikan, pelayanan informasi, penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata).

Ketiga, aksesibilitas: elemen-elemen ini adalah yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi, seperti infrastruktur, Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, perlengkapan (ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi umum), faktorfaktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan, dan harga yang dikenakan, peraturan pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan transportasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Leksono, 2013)<sup>27</sup>. Menurut Nazir (2005), analisis deskriptif adalah metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, maupun suatu kelas peristiwa dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

---

<sup>27</sup> Leksono, S. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 181

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>28</sup>.

Teknik penentuan sampel/informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini dipakai untuk jenis penelitian yang mengutamakan tujuan daripada sifat populasi dalam menentukan subyek/informan (Bungin, 2013)<sup>29</sup>. Teknik ini meniscayakan informan yang dipilih adalah *key person* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kepakaran, pihak pemilik otoritas, dan pemangku kepentingan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu; studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profile Potensi Wisata Kabupaten Garut

Kabupaten Garut merupakan salah satu wilayah yang berada di Propinsi Jawa Barat, memiliki luas sekitar 306.688 Ha atau 6,94 % dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Letak geografis berada disebelah selatan Propinsi Jawa Barat dengan koorditad 6° 57' 34" -7° 44' 57" Lintang Selatan dan 107° 24' 3" - 108° 24' 34" Bujur Timur, dengan batas –batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Sumedang
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Secara administratif wilayah pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari, 42 Kecamatan, 94 Desa. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2018)<sup>30</sup>. Kabupaten Garut kaya akan potensi daya tarik alam dan budaya, di kenal dengan sebutan GURILAPSS (Gunung, Rimba Alam, Laut, Pantai, Sungai, dan Seni Budaya), untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Daya tarik wisata di Kabupaten Garut mengalami kemajuan seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pelaku kepariwisataan di Kabupaten Garut.

<sup>28</sup> Nazir, M. (2005). Metodologi Penelitian. Galia Indonesia. Jakarta. hal. 53

<sup>29</sup> Bungin, B. (2013). Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada. Jakarta. hal. 118

<sup>30</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. (2018). Kajian Prospektif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2018. Disparbud Kabupaten Garut. Garut

Pembagian Daya Tarik wisata di Kabupaten Garut, dibedakan atas daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan buatan. Daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya maupun buatan di Kabupaten Garut diuraikan sesuai kawasan Strategis Parawisata Kabupaten Garut (KSPK) sebagai berikut:

1. KSPK Perkotaan
2. KSPK Garut Tengah
3. KSPK Garut Utara
4. KSPK Garut Selatan

Berdasarkan keempat KSPK tersebut Pemerintah Kabupaten Garut mencanangkan program prioritas pembangunan 10 destinasi wisata agar lebih nyaman dan aman. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut, Budi Gan Gan mengatakan pembangunan ini dilakukan agar dapat mendongkrak kunjungan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara di Garut.

Program prioritas 10 destinasi wisata tersebut yakni objek wisata Bagendit di Kecamatan Banyuresmi, Situ Canguang di Kecamatan Leles, Pantai Sayangheulang di Kecamatan Pameungpeuk, Cijeruk, Karang Paranje di Kecamatan Cibalong, Pantai Rancabuaya di Kecamatan Caringin, kawah Talaga Bodas di Kecamatan Pangatikan, wisata kawasan Kamojang di Kecamatan Samarang, kebun binatang Cikembulan di Kecamatan Kadungora, dan pemandian air panas Darajat di Kecamatan Pasirwangi. Penentuan destinasi wisata yang masuk prioritas itu berdasarkan hasil penilaian tingkat kunjungan dan potensi wisatanya yang bagus sehingga banyak pengunjung.

Program pembangunan atau pengembangan destinasi wisata di Garut diupayakan dapat berjalan sesuai harapan sehingga memberikan dampak baik terhadap pariwisata Garut, khususnya menumbuhkan perekonomian masyarakat Garut.

### **Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Garut**

Kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Garut senantiasa diarahkan pada tiga aspek yang diharapkan dapat menjangkau seluruh sektor pembangunan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, serta menjaga pembangunan agar tetap berjalan secara

berkesinambungan (*sustainable development*). Hal ini didasarkan pada konsep pengembangan wilayah yang tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi lebih pada merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (*sustainable welfare*).

Potensi kepariwisataan Kabupaten Garut secara faktual selama ini menjadi salah satu sumber PAD dan pendukung pengembangan ekonomi masyarakat sehingga memiliki prospek pengembangan di masa depan.

Untuk optimalisasi hal tersebut diprogramkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut berdasarkan RIPPDA 2014-2019 Kabupaten Garut Bidang Pariwisata<sup>31</sup>, sebagai berikut:

A. Pengembangan Daerah Wisata, melalui kegiatan :

1. Pemetaan dan Profil kepariwisataan,
2. Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan,
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sarana Prasarana Penunjang dan fasilitas Pariwisata,
4. Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelayanan Jasa Usaha dan lembaga mitra kepariwisataan,
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.

B. Pengembangan Pemasaran Wisata, melalui kegiatan:

1. Pengadaan Material Promosi,
2. Bursa Pasar Wisata,
3. Pemilihan Mojang Jajaka,
4. Event Pariwisata,
5. Penataan sarana prasarana Gedung TIC,
6. Pengembangan sentra-sentra industri kerajinan, peternakan, pertanian, dan makanan khas Kabupaten Garut dengan kegiatan: Pengadaan Produk Unggulan Kabupaten Garut.

C. Pengembangan Nilai Budaya, melalui kegiatan:

1. Dokumentasi dan inventarisasi seni tradisional,
2. Seminar dan Lokakarya Sejarah Kabupaten Garut.

D. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui kegiatan:

---

<sup>31</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. (2019). Kebijakan Pengembangan Pariwisata 2014-2019. Disparbud Kabupaten Garut. Garut.

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

1. Inventarisasi dan dokumentasi bangunan kuno (Heritage),
  2. Dokumentasi dan Inventarisasi Benda- benda Pusaka,
  3. Pameran Benda Cagar Budaya Bergerak.
- E. Pengelolaan Keanekaragaman Budaya, melalui kegiatan:
1. Pagelan Seni dan Budaya,
  2. Pasangiri, Festival, dan Helaran Seni Budaya,
  3. Gelar Aneka Budaya Garut,
  4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan program tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Kunjungan Objek Wisata dan Akomodasi**

Tahun	Akomodasi		Obyek Wisata	
	Wisman*	Wisnus**	Wisman	Wisnus
2014	1.941	182.196	5.261	776.796
2015	3.993	234.688	7.189	879.862
2016	2.648	235.136	8.280	797.316
2017	3.555	214.743	4.055	929.569

\*Wisatawan Mancanegara \*\* Wisatawan Nusantara

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2019.

Berdasarkan tabel 1, secara umum jumlah wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Garut dari tahun ke tahun fluktuasi jumlah kunjungan, hal tersebut salah satunya berkaitan dengan informasi perjalanan wisata ke Kabupaten Garut dan sekitarnya yang belum optimal sehingga kadang membingungkan calon wisatawan. Apalagi bagi mereka yang baru pertamakali datang ke Kabupaten Garut dan belum mengetahui sama sekali tentang Kabupaten Garut, mereka akan sulit untuk menentukan tujuan wisata mereka selanjutnya.

**Tabel 2. Kunjungan Terbanyak Obyek Wisata Alam Tahun 2017**

Obyek Wisata Alam	Jumlah Pengunjung
Cipanas	227.631 Orang
Situ Bagendit	75.963 Orang
Pantai Santolo	45.008 Orang
Pantai Rancabuaya	41.178 Orang
Pantai Sayangheulang	36.668 Orang
Lapang Golf Ngamplang	30.393 Orang
Curug Orok	27.268 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2019.

Pada tabel 2, obyek wisata alam yang memiliki tingkat kunjungan terbanyak yaitu Cipanas, dimana tingginya tingkat kunjungan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain; Cipanas merupakan salah satu destinasi wisata utama dan favorit di Kabupaten Garut, merupakan destinasi wisata alam untuk menikmati air panas yang bersumber dari gunung api aktif yaitu gunung Guntur, dan sudah terkenal sampai ke luar kota. Lokasi objek wisata Cipanas sangat strategis karena dekat dengan pusat kota dan sarana akomodasi penginapan.

**Tabel 3. Kunjungan Terbanyak Obyek Wisata Jiarah Tahun 2017**

Obyek Wisata Jiarah	Jumlah Pengunjung
Makam Kramat Godog	26.672 Orang
Makan Jafar Sidik	20.784 Orang
Makam Kramat Cinunuk	19.642 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2019.

Objek wisata jiarah yang banyak dikunjungi di Kabupaten Garut adalah Makam Kramat Godog, yaitu makam yang terletak di lereng Gunung Karacak yang dipercaya sebagai makam Prabu Kiansantang atau dikenal sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci atau Sunan Godog bagi masyarakat sekitar makam. Destinasi wisata Makam Kramat Godog ini tidak terlepas dari sejarah kerajaan Padjajdaran di wilayah Tatar Sunda dan banyak dikunjungi pada waktu-waktu tertentu semisal bulan Rajab dan bulan Syawal. Akses untuk berkunjung ke lokasi ini relatif baik,

meski beberapa bagian berlubang dan transportasi yang dapat masuk ke lokasi yaitu oek dan kendaraan kecil.

**Tabel 4. Kunjungan Terbanyak Obyek Wisata Budaya Tahun 2017**

Obyek Wisata Budaya	Jumlah Pengunjung
Cagar Budaya Cangkuang	46.327 Orang
Kampung Dukuh	20.244 Orang
Cagar Budaya Ciburuy	15.055 Orang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, 2019.

Cagar Budaya Cangkuang merupakan kawasan wisata yang terletak ditengah danau kecil (Situ) terdiri dari Candi Cangkuang, pemukiman adat Kampung Pulo dan makam Embah Dalem Arief Muhammad yang merupakan leluhur Kampung Pulo dan juga penyebar agama Islam. Akses ke lokasi wisata cukup bagus meski ukuran lebar jalan relatif kecil sehingga kendaraan besar seperti bus tidak dapat masuk sehingga harus menggunakan angkutan umum.

Hasil pelaksanaan program-program pembangunan bidang pariwisata apabila dianalisis dan dinilai berdasarkan kriteria yang dikemukakan Yoeti (2008) yaitu *attraction* (atraksi), *accessibility* (aksesibilitas), dan *amenities* (fasilitas) maka dibalik keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, disisi lain masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan antara lain:

1. Pihak ketiga yaitu investor selaku pemilik modal seringkali tidak melakukan konsultasi dalam melakukan pengembangan usaha pariwisata kepada BAPPEDA dan BPMPT sehingga tidak sesuai dengan RIPPDA dan RTRW. Sebagai contoh banyak investor yang sudah membangun objek wisata baru melapor ke Dinas Penanaman modal dan perizinan terpadu .pembangunan tersebut terkadang tidak sesuai dengan RIPPDA dan RTRW sehingga dianggap bermasalah.
2. Dana Alokasi Khusus sebesar 5 Milyar pada tahun 2018 hanya difokuskan untuk pembangunan objek wisata Situ Bagendit, Cangkuang, dan Sayang

*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Heulang, sehingga objek wisata lainnya tidak mendapat alokasi dana pembangunan.

3. Aksestabilitas yang masih kurang mendukung menuju lokasi wisata dimana jalannya masih sempit sehingga menyebabkan kemacetan dan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan.
4. Sarana dan prasarana pada objek wisata belum dikelola dengan baik, karena terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Hal ini berdampak pada kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke obyek wisata.
5. Program budaya sadar wisata pun masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum sadar akan manfaat dari pariwisata dan kurangnya sosialisasi dan informasi tentang obyek-obyek wisata di Kabupaten Garut.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik. Namun pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut secara keseluruhan belum optimal dimana masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada minat kunjungan wisatawan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Garut.

Rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan implementasi pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut antara lain:

- a. Berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas bagi investor dalam memperoleh ijin untuk pengembangan infrastruktur atau fasilitas obyek wisata diperlukan peningkatan koordinasi dan konsultasi diantara pemangku kepentingan, agar terjadi pemahaman yang sama dalam proses implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut.
- b. Perencanaan prioritas alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata berdasarkan KSPK Kabupaten Garut dan melibatkan program CSR perusahaan-perusahaan di Kabupaten Garut,
- c. Meningkatkan sosialisasi budaya sadar wisata yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komunitas Peduli Wisata serta membentuk Kader-

Kader Wisata yang peduli terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Garut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2013). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Garut. (2018). *Kajian Prospektif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Tahun 2018*. Garut: Disparbud Kabupaten Garut.
- Indraningsih, G. (2019, Juni). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA*, 1(1), 31-40.
- Irawan, E. (2017, Juli-Desember). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jejaring Administrasi Publik*, 7(2), 757-770.
- Iskandar, J. (2017). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik* (Cetakan Keempat ed.). Bandung: Puspaga.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kristiana, & Nathalia. (2019, Juni). Peran Pelaku Kepentingan Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 4(1), 60-66.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadie. (2015, Agustus). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Teluk Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 90-94.

- Nazir, M. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pramudita, A., Lestari, H., & Sulandari, S. (n.d.). *Implementasi Pembangunan Kepariwisataan Di Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro .
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Jakarta.
- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Services.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Paramita.